

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang efektivitas penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No:180/PID.B/2013/PN.LBT dan No:58/Pid.B/2014/PN.LBT serta putusan No.47/PID.B/2013/PN.TLM, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana baik untuk kasus dengan putusan Nomor : 180/PID.B/2013/PN.LBT dan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.LBT serta putusan dengan Nomor : 47/PID.B/2013/PN.TLM, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni berdasarkan pasal 14a dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. efektivitas penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap ke tiga kasus dengan putusan Nomor : 180/PID.B/2013/PN.LBT dan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.LBT serta putusan Nomor . 47/PID.B/2013/PN.TLM, masih belum berjalan efektif. Hal tersebut dilihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1.2 Saran

Pelaksanaan penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana baik untuk kasus dengan putusan No:180/PID.B/2013/PN.LBT dan No:58/Pid.B/2014/PN.LBT serta putusan No.47/PID.B/2013/PN.TLM agar dapat berjalan dengan baik, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan pemerintah desa setempat. Serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus dalam mengatur tentang pelaksanaan pidana bersyarat.
2. efektiv tidaknya hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, maka sebaiknya dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pengawasan atau eksekutor putusan pidana bersyarat baik di Pengadilan Negeri Limboto maupun Pengadilan Negeri Tilamuta, dimana Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat harus bersifat profesional termasuk adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, agar putusan tersebut benar-benar efektif.